



BULETIN

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 824/VII/2014

II/JULI 2014



## DPR Setujui RUU Kesehatan Jiwa

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dan [tvparlemen.com](http://tvparlemen.com)

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA JULI 2014

Kegiatan DPR-RI pada minggu kedua Juli 2014 antara lain adalah Kegiatan Rapat paripurna DPR-RI ke-32 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014 pada Kamis, 10 Juli. Agenda Rapat Paripurna adalah Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turki, pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap enam RUU Usul Inisiatif AKD, menjadi RUU Usul Inisiatif DPR dan Pidato Penutupan Masa Sidang ke IV. Berikut ringkasannya:

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Pada agenda pertama, Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turki. Wakil Ketua Komisi I, Tantowi Yahya menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat I tentang RUU Pengesahan Persetujuan tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki. Bagian-bagian penting dalam persetujuan kerjasama tersebut antara lain meliputi, (1) penyediaan fasilitas yang diperlukan bagi penelitian bersama, pengembangan, produksi dan proyek modernisasi, bantuan timbal balik dalam bidang produksi dan pengadaan produk industri dan jasa pertahanan, penjualan produk akhir, pertukaran informasi ilmiah dan teknis, partisipasi dalam pameran pertahanan dan simposium, serta penjualan atau pembelian yang saling menguntungkan; (2) pembentukan komite bersama dalam industri pertahanan; (3) kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia, dan adanya komitmen para pihak untuk mengedepankan keamanan dan integritas masing-masing negara.

**Rapat Paripurna memberikan persetujuan secara aklamasi atas RUU tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turki.**

Agenda kedua, pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap enam RUU Usul Inisiatif AKD menjadi RUU usul DPR. Keenam RUU tersebut yaitu: RUU usul Inisiatif Baleg DPR tentang Pertembakauan, RUU usul Inisiatif



Komisi VIII DPR-RI tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, RUU usul Inisiatif Komisi VIII DPR-RI mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, RUU usul Inisiatif Komisi X DPR-RI tentang Kebudayaan, RUU usul Inisiatif Komisi IV DPR-RI tentang Perkebunan, dan RUU usul Inisiatif Komisi IV DPR-RI tentang Konservasi Tanah dan Air.

Agenda ketiga, Pidato Ketua DPR RI Pada Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2013-2014. Dalam pidatonya, Ketua DPR menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan fungsi legislasi. Melaporkan bahwa Masa Sidang IV telah selesai dibahas 8 RUU, baik RUU prioritas Prolegnas maupun RUU Kumulatif Terbuka. RUU Prioritas Prolegnas, yaitu penyelesaian RUU tentang Kesehatan Jiwa dan RUU Perubahan UU No.

27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. RUU kumulatif terbuka yaitu 3 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) untuk disahkan menjadi UU, yaitu pembentukan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara; RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik India; RUU tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

Untuk RUU Perubahan atas UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), telah mendapatkan persetujuan secara aklamasi di dalam sidang paripurna Dewan. Visi utama perubahan UU MD3 diarahkan bagi



terwujudnya Parlemen yang produktif, efektif dan akuntabel. Sejalan dengan pemikiran visi di atas, inti dari substansi baru penguatan kelembagaan dilakukan dengan melakukan penataan, restrukturisasi, remodifikasi kelembagaan dan pelaksanaan hak-hak, tugas dan wewenang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, memperkuat dan memperjelas beberapa substansi yaitu penguatan peran komisi sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi DPR, penguatan peran Badan Kehormatan DPR yang bertugas menjaga integritas dan kewibawaan anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Juga, dilakukan penataan tugas dan fungsi Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan penyempurnaan mekanisme pembentukan UU. Penguatan kelembagaan DPR juga perlu diiringi dengan penguatan Sistem Pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR melalui penegasan terhadap pembentukan Badan Keahlian DPR.



Dalam masa sidang IV Komisi dan Badan Anggaran telah melakukan pembahasan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Pembicaraan Pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2015. Dalam pembahasan tersebut diperoleh kesepakatan tentang RKP Tahun 2015 dan Pembicaraan Pendahuluan tahun 2015. RKP tahun 2015 harus sesuai dengan misi dan arah pembangunan nasional yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 tema RKP tahun 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan”. Dalam bidang pengawasan, dilaporkan bahwa Komisi-Komisi bersama pasangan kerja masing-masing telah melakukan rapat kerja. Komisi II telah mengkritisi kinerja KPU dan Bawaslu pada saat pelaksanaan Pileg 9 April dan pembahasan serta persiapan pelaksanaan Pilpres 2014. Komisi-Komisi lain juga membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat yang dibahas dan dicari solusi pemecahannya. Komisi XI telah menyelesaikan *fit and proper test* calon Deputy Gubernur Bank Indonesia yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 24 Juni 2014 yang lalu. DPR juga telah memberikan pertimbangan/persetujuan terhadap pencalonan Duta-Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia yaitu Duta Besar Kerajaan Denmark, Kerajaan-Belgia, Mongolia, Republik Persatuan Tanzania, Jepang, Kerajaan Swedia dan Republik El Salvador.

Selanjutnya dalam pidato penutupan, Ketua menyampaikan beberapa hal khususnya; (1) berkaitan dengan pelaksa-

naan Pilpres 9 Juli 2014. Ketua DPR RI menyatakan bahwa kita patut bersyukur kehadiran Allah SWT, bahwa sepanjang hari Rabu 9 Juli 2014, bangsa Indonesia telah melaksanakan perhelatan demokrasi yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden akan menentukan arah kehidupan negeri kita untuk lima tahun ke depan. Di dalam alam demokrasi mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dapat dibenarkan, tetapi bukan untuk saling memunculkan perpecahan. Proses Pilpres telah berlangsung dengan aman, lancar dan terkendali. Pilpres ini menjadi sarana bagi proses pendidikan masyarakat dalam berdemokrasi dan mengimplementasikan nilai-nilai universal demokrasi yang berupa kesetaraan, keadilan, hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara melalui cara-cara yang beradab.

KPU akan menetapkan Presiden/Wakil Presiden terpilih pada tanggal 22 Juli 2014. Ketua DPR mengharapkan setelah pengumuman resmi, semua pihak menerima hasil pilihan rakyat dengan baik, dengan tetap menjaga situasi kondusif yang merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa. Masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan yaitu mengawasi dan memantau perhitungan suara, yang harus dilakukan dengan cermat, jujur dan transparan. Kita tidak menginginkan terjadinya kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pilpres 2014 cukup mendapatkan perhatian dari negara-negara sahabat. Mereka memberikan apresiasi dan menghormati proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia, dan memuji bahwa pelaksanaan demokrasi yang berjalan diyakini membawa manfaat bagi Indonesia di berbagai sektor. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan mampu menciptakan stabilitas politik.

(2) mengenai perkembangan situasi di jalur Gaza. Ketua DPR RI menyampaikan bahwa hari-hari ini jalur Gaza yang memanas kian memprihatinkan menyusul operasi militer Israel terhadap Hamas yang telah menimbulkan korban jiwa di pihak sipil, terutama terbunuhnya wanita dan anak-anak. Situasi ini tidak hanya sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, tetapi juga akan memunculkan perang terbuka. Melihat aksi kekerasan ini, kita tidak lagi bicara tentang perbedaan agama, muslim dan non-muslim, namun kita harus melihat pada satu sisi, yaitu sisi kemanusiaan, karena perang terbuka dipastikan akan membawa korban besar terutama perempuan dan anak yang tidak berdosa.

Dewan mengecam semua bentuk kekerasan, baik yang dilakukan Palestina maupun Israel. Dewan meminta Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran serta menyatakan sikap keras agar perang terbuka antara kedua pihak tidak terjadi. Dewan bertekad untuk bekerjasama dengan OKI, guna menyatakan sikap dan memberikan dukungan kongkret bagi terwujudnya perdamaian kedua pihak yang berdampak pada keamanan kawasan. Dalam kaitan dengan situasi Gaza, Ketua DPR RI memimpin do'a bagi para korban di Palestina, agar mendapat tempat yang tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, juga tercapainya perdamaian di kawasan. \*\*\*

# DPR Setujui RUU Kesehatan Jiwa



Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno dan Anggota DPR Nova Riyanti Yusuf bersama Menkes, dan Mental Health usai Pengesahan RUU Keswa

Paripurna DPR akhirnya menyetujui RUU Kesehatan Jiwa menjadi Undang-Undang. “Melalui RUU Kesehatan Jiwa diharapkan kita bisa meningkatkan kesehatan jiwa baik mutu, akuntabilitas dan perlindungan yang non diskriminatif,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Supriyatno saat menyampaikan pandangannya terkait RUU Kesehatan Jiwa, di Gedung Nusantara II, Selasa, (8/7).

Menurutnya, UU ini memberikan perlindungan dan pelayanan Kesehatan Jiwa bagi orang yang mengalami masalah kejiwaan dan gangguan jiwa.

“Selain itu melalui UU ini pelayanan kesehatan semakin terintegrasi melalui upaya promotif, preventif dan rehabilitatif, serta meningkatkan mutu kesehatan jiwa sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” katanya.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPR, rekan Pimpinan Komisi IX dan anggota, fraksi serta pemerintah atas kerjasamanya sehingga dapat diselesaikannya RUU Kesehatan jiwa pada periode ini.

Pada kesempatan itu, Menteri Kese-

hatan Nafsiah Mboi juga menyambut baik pengesahan UU ini. “Pemerintah berharap UU tentang Kesehatan Jiwa dapat menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik,” kata Nafsiah.

Pembahasan Undang-undang Kesehatan Jiwa sudah bergulir sejak diwacanakannya tahun 2010 lalu. Artinya sudah hampir lima tahun RUU Kesehatan Jiwa mandek hingga akhirnya disetujui di tingkat Paripurna DPR RI pada bulan Juli 2014 ini. *(Sugeng Irianto)/ foto:odjie/parle/iw.*

## Pejabat Publik Wajib Tes Kesehatan Jiwa

Dengan disahkannya RUU Kesehatan Jiwa (RUU Keswa) menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (8/7), maka semua pejabat di pemerintahan, dokter dan aparat penegak hukum harus menjalani tes kesehatan jiwa.

“UU ini terdiri dari 91 pasal dan 10 bab. Dibahas secara

singkat hanya dua kali masa sidang dan tiga kali konsinyering oleh Komisi IX DPR RI. Karena UU ini sangat penting, mengingat orang yang mengalami gangguan jiwa makin meningkat atau sebanyak 6 persen di seluruh Indonesia,” kata Anggota Komisi IX DPR Wirianingsih di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7), dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk

'RUU Kesehatan Jiwa'. Selain Wirianingsih, hadir pula Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes Eka Viora.

Menyinggung kriteria gangguan kejiwaan tersebut antara lain terkait gangguan ingatan, tak bisa sosialisasi diri di tengah masyarakat, terganggu kepribadiannya, stress, depresi, tak bisa meningkatkan kualitas hidup dirinya sendiri disebabkan bencana, putus cinta dan lain-lain.

"Dengan disahkannya UU ini, maka pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa sejak dari puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar. Jadi penderita bisa ditangani mulai dari puskesmas oleh dokter umum yang sudah dilatih," ujarnya.

Mengenai anggaran yang masih kecil, kata politisi PKS itu, maka Kementerian Keuangan harus didorong untuk menambah anggaran tersebut agar pelayanan kesehatan bisa melayani seluruh masyarakat. "Jadi, perlu kerjasama masyarakat, DPR, dan Kemenkeu RI untuk menyosialisasikan UU Kesehatan Jiwa ini agar semua mendapat pelayanan dengan baik," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes Eka Viora mengatakan, dengan disahkannya RUU Kesehatan Jiwa menjadi UU maka akan menjadi solusi bagi terjadinya pemasangan bagi orang gila selama ini di pelosok tanah air. Apalagi sudah terdapat 57 ribu orang gila (14,3 persen) yang dipasang di tengah masyarakat, sedangkan yang mengalami stress ringan sebanyak 16 juta orang.

"UU ini cukup komprehensif dan pemerintah harus cepat bergerak untuk melaksanakannya, karena yang mengalami gangguan jiwa terus meningkat. Sekaligus sebagai solusi bagi pemasangan di masyarakat akibat keterbatasan akses dan layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah,"



Anggota Komisi IX DPR Wirianingsih didampingi Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes Eka Viora

kata Eka Viora.

Menurut Eka, selama ini sudah ada 2005 Puskesmas, tapi tidak semua menyediakan layanan Kesehatan Jiwa. Sementara Puskesmas yang menjadi rujukan, baru ada 33 buah RS di 26 provinsi dan 16 RS milik swasta. Hanya saja dananya baru dua persen dari anggaran Kemenkes yang hanya lima persen dari APBN. Padahal WHO menetapkan enam persen. Yang jelas kata dia, setiap orang sakit jiwa itu tidak harus ditangani oleh dokter spesialis jiwa, melainkan bisa ditangani oleh dokter umum di Puskesmas.

Menurut Eka Viora, UU Kesehatan Jiwa ini sebenarnya sudah ada sejak 1966, yaitu UU No 3/1966 tapi cakupannya masih sempit dan terbatas, hanya melindungi gangguan jiwa berat. Pada tahun 1992 UU ini otomatis hilang karena sudah ada UU Kesehatan dan terus mengalami revisi sampai masuk Prolegnas DPR periode 2009-2014. (nt)/foto:andri/parle/iw.

## Pemerintah Perlu Atur Secara Tegas Lembaga Survey



Anggota DPR Tantowi Yahya

Anggota DPR Tantowi Yahya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah untuk mengatur lembaga-lembaga survey dengan tegas. "KPU harus menetapkan lembaga survey mana saja dan berapa idealnya yang diberi otorisasi berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu untuk melakukan *quick count* (hitung cepat) pilpres atau pilkada. Jika tidak, maka tidak mustahil akan kembali terulang di kemudian hari," katanya menjawab pers sebelum Sidang Paripurna DPR, Kamis (10/7) di Komplek Parlemen, Senayan.

Hal itu dikatakannya menanggapi hasil Pilpres 9 Juli kemarin, dimana masing-masing kubu mengklaim memenangkan

Pilpres 2014. Berdasarkan hitung cepat lembaga survey SMRC, Kompas, dan CSIS-Cyrus Network mengklaim pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK yang unggul. Namun lembaga survei lainnya yakni Jaringan Suara Indonesia (JSI), Puskaptis, dan LSN kompak mengklaim, pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta lah yang unggul.

Menurut Tantowi yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR ini, permasalahan itu tidak menjadi buruk kalau lembaga itu bukan Times dari salah satu capres. Namun ketika lembaga itu partisan, sikap apa adanya itu cenderung dicurigai karena mereka itu adalah bagian dari Times.

“Ini adalah hal-hal yang perlu diatur secara khusus oleh KPU dan Pemerintah untuk persiapan pilkada dan Pilpres sebab pilkada bisa seperti ini,” jelas Tantow.

Terhadap lembaga survey yang salah

atau menggiring opini publik, kata Tantow, itu merupakan tugas KPU. Kalau sudah melakukan penyimpangan, harus diberikan sanksi dan ada parameternya. “Makanya KPU atau Pemerintah harus memberikan batasan-batasan khusus. Kalau tidak, ini akan menjadi permainan

dan semua orang bisa main,” kata Tantow menegaskan. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

## DPR Minta Kebutuhan Pokok Diperkuat, Cegah Spekulasi

Pemerintah diminta untuk menyediakan kebutuhan pokok masyarakat yang kuat, sebab lebaran atau hari raya Idul Fitri itu terjadi setiap tahun. Seharusnya pemerintah sudah mengantisipasi sejak jauh sebelumnya. “Intinya persediaan atau stok kebutuhan pokok harus kuat dan cegah spekulasi untuk bermain,” ujar anggota DPR Hendrawan Supratikno dan Mindo Sianipar menanggapi harga kebutuhan pokok yang melonjak menjelang lebaran.

Ditemui Parle sebelum Sidang Paripurna DPR, Kamis (10/7) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Mindo Sianipar yang juga anggota Komisi IV DPR (bidang pangan dan pertanian) ini mengingatkan, walaupun ada kenaikan itu toleransinya sedikit. Jangan sampai nanti harga produk-produk pertanian naik, tetapi tidak dinikmati juga oleh petani, malah oleh para pedagang.

“Disinilah tugas pemerintah untuk mengendalikan. Saya tidak punya keyakinan bahwa harga yang di pasar itu sebanding dengan kenaikan yang dirasakan petani. Malah bisa ditingkatkan petani turun karena infrastrukturnya rusak. Di daerah produsen meski



Anggota Komisi IV DPR Mindo Sianipar

menjelang lebaran seperti ini tetap tidak mengalami kenaikan, tetap saja ditekan harganya dengan alasan daya angkutnya naik,” ungkap Mindo.

Dalam pengamatannya, hal-hal seperti inilah bukan hal yang baru. Salah satu kinerja pemerintah itu disitu, tidak hanya kementerian pertanian, kementerian perdagangan juga bidang infrastruktur. “Jadi koordinasinya itu yang harus kuat. Kelemahan koordi-

nasi seperti inilah yang selama ini terus terjadi,” tukasnya.

Ditanya kaitannya dengan *supply and demand* sehingga harga barang melonjak karena permintaan meningkat, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, kalau pasarnya bebas, betul-betul terbuka, maka hal itu tidak mempegaruhi. “Kita tidak seperti itu, yang kita inginkan adalah pasar yang berkeadilan dan harus ada campur tangan pemerintah. Misalnya kalau diketahui berdekatan dengan lebaran seharusnya desain produksinya termasuk kapasitas produksi yang ditambah, harus sudah diketahui,” jelas Mindo.

Sementara itu anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno mendesak pemerintah harus menciptakan persediaan yang kuat yang memungkinkan para spekulasi tidak main-main. Sekarang, lanjut, anggota Komisi VI (bidang perdagangan dan industri ini) hal-hal seperti ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya, masa-masa menjelang lebaran seperti sekarang ini dijadikan ajang untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

## Pengesahan RUU MD3 Diwarnai WO dan Hujan Interupsi

Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pengesahan RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akhirnya dicapai, namun diwarnai *walk out* (WO) tiga fraksi yakni PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Hanura. Sebelumnya rapat juga diwarnai hujan interupsi dari para anggota sehingga dilakukan skors untuk melakukan lobi pimpinan fraksi hingga waktu buka puasa tiba. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi San-

toso dibuka kembali Selasa (8/7) pukul 19.15 setelah diskors sejak sore harinya, dihadiri oleh 467 anggota.

Jumlah anggota ketiga fraksi yang melakukan WO tersebut adalah 79 anggota FPDJ Perjuangan, 19 anggota FPKB dan 12 anggota Fraksi Hanura. Ketiga fraksi ini menyatakan keberatan dengan rumusan hasil Pansus, terutama masalah pemilihan pimpinan DPR dan alat-alat kelengkapan dewan



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo

yang lain. Mereka berharap proses pemilihan pimpinan DPR seperti saat tahun 2009 silam yang mengedepankan asas musyawarah mufakat dan

memberi penghargaan kepada partai pemenang pemilu yang secara otomatis menduduki jabatan ketua DPR.

“Apabila ini dipaksakan untuk diputuskan maka kami tidak bertanggung jawab atas keputusan tersebut dan mengambil sikap tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan,” tandas Arif Wibowo selaku juru bicara fraksi PDI-Perjuangan yang didukung oleh fraksi PKB dan Hanura.

Akhirnya proses pengambilan keputusan RUU MD3 dilakukan secara aklamasi diikuti oleh para anggota dari Fraksi PD, Fraksi Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra, khususnya opsi ketiga yang semula disiapkan untuk diputuskan dengan pemungutan suara (*voting*).

Dengan disetujuinya revisi RUU MD3 ini, maka Ketua DPR nantinya akan dipilih, tidak lagi menjadi hak otomatis bagi partai pemenang pemilu. Selain jabatan Ketua DPR, juga Pimpinan alat-alat kelengkapan Dewan yang lain seperti Komisi dan Badan-badan juga akan akan dipilih.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menambahkan, bukan hanya pimpinan DPR saja, pimpinan MPR dan pimpinan alat-alat kelengkapan dewan seperti pimpinan komisi dan badan akan dipilih melalui system paket. “Mekanisme ini yang ditempuh, karena ini mutatis mutandis. Pimpinan badan-badan, komisi, dan alat-alat kelengkapan dewan akan dipilih melalui mekanisme yang sama,” jelas Priyo. (*mp,od*)/foto:andry/parle/iw.

## Pelibatan TNI dalam Pengamanan Pemilu Masih Wajar

Anggota Komisi III DPR Desmon J. Mahesa meminta segenap pihak tidak merespon berlebihan, pelibatan TNI dalam pengamanan Pemilu Presiden 9 Juli. Baginya langkah tersebut masih wajar dan merupakan kebijakan antisipasi terhadap kemungkinan konflik horizontal yang bisa saja terjadi.

“Kalau saya melihat ini masih wajar sebagai bentuk antisipasi, jadi biasa saja tidak ada alasan tertentu. Kita bicara faktor keamanan yang mungkin terjadi yaitu konflik horizontal dan mempersiapkan bantuan TNI tidak bisa diterjemahkan ini akan terjadi sesuatu yang konkrit. Langkah ini lebih baik daripada terlambat mengantisipasi,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/14).

Ia menekankan pengalaman konflik di masa lalu sudah cukup menjadi pembelajaran betapa pentingnya langkah antisipasi. Apalagi menurutnya anggaran untuk pengamanan pemilu sudah diberikan kepada aparat terkait yaitu Polri dan TNI.

“Kasus 27 Juli dan Kerusuhan Mei sudah cukup jadi pelajaran jadi jangan sampai terlambat. Panduan utama tentu dalam pengamanan Pilpres ini kita tetap mengedepankan Polri,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Pendapat berbeda disampaikan anggota Fraksi PKB Abdul Kadir Karding saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna. Ia menilai kemunculan TNI dalam proses pengamanan Pemilu Presiden malah memunculkan suasana mencekam.

“TNI itu posisi *back up* dan fungsi keamanan ada di polisi.



Anggota Komisi III DPR Desmon J. Mahesa

Kalau polisi minta baru boleh. Tapi yang menonjol sekarang itu TNI, seakan-akan mau diciptakan suasana ini mencekam dan melegitimasi kalau ada apa-apa,” ungkapnya.

Ia juga menyebut langkah TNI pada saat Pilpres 2009 lebih elegan dengan menyebar sejumlah spanduk di seluruh daerah. “Waktu itu ada spanduk Damai itu Indah di mana-mana, kenapa TNI tidak seperti itu saja,” demikian Karding. (*iky*)/foto:iwan armanias/parle.

# Kisruh Pilpres di Hongkong Perlu Dijadikan Pelajaran

Berdasarkan penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kisruh pilpres yang terjadi di Hongkong karena masalah keterbatasan waktu. Pelaksanaan pilpres di Hongkong yang bukan di wilayah Indonesia, peraturannya sangat ketat termasuk ijin dan masalah lain. “Kalau sudah lewat jamnya, implikasinya banyak Yang penting kasus Hongkong harus menjadikan pelajaran kedepan bahwa harus lebih siap termasuk memberitahukan kepada pemilih disana bahwa kalau lewat waktunya tidak bisa lagi,” kata anggota DPR Martin Hutabarat sebelum Sidang Paripurna DPR, Selasa (8/7) di Jakarta.

Politisi partai Gerindra ini mengatakan kondisi di Hongkong berbeda dengan di Indonesia dimana tempat pemungutan suara (TPS) jumlahnya terbatas dan tempatnya jauh dari warga Indonesia. Berbeda dengan di negara sendiri, di setiap RT ada TPS



Anggota DPR Martin Hutabarat

dan berdekatan dengan rumah kita.

Karena itu kembali mendesak, kasus

Hongkong harus dijadikan pelajaran sehingga pemilihan presiden atau pemilihan umum yang akan datang lebih tersosialisasi kepada masyarakat Indonesia di luar negeri. Menanggapi usulan pemilu ulang, anggota Komisi III DPR ini menegaskan, “Nonsen, tidak masuk akal”.

Pasalnya lanjut Martin, hasil pemungutan suara itu sudah masuk taraf perhitungan. Apalagi untuk mendapatkan ijin, tidak gampang. Posisi WNI disana adalah pekerja sehingga tidak bisa setiap hari meminta. Karena itu pula kalau ada usulan pemilu presiden diulang banyak hal dipertanyakan, siapa yang mau datang, tempatnya dimana, dana dan Panitianya dari mana? “Proses pilpres di luar negeri sudah selesai dan masuk proses perhitungan, pemilu ulang apa lagi,” kata Martin menandakan. (mp, mf)/foto:andri/parle/iv.

# DPR Apresiasi Meningkatnya Pemilih di Luar Negeri

Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa mengapresiasi meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden kali ini. Terkait dengan adanya isu kerusuhan saat pemilihan presiden di Hongkong beberapa hari yang lalu, saat ditemui Parle usai Rapat kerja dengan MenPANRB, Azwar Abubakar, Senin(7/7), Agun meyakini bahwa hal tersebut bukan merupakan kesalahan KPU, Bawaslu ataupun PPLN.

Menurutnya sesungguhnya mekanisme kerja dalam Pemilu dimulai dari pendaftaran pemilih, dan segenap tahapan-tahapan pemilu, sejak pemilu legislatif sudah dipublikasikan atau sudah diumumkan. Sehingga semua orang sudah tahu tentang mekanisme tersebut. Ia meminta agar Bawaslu dan KPU untuk melacak lebih jauh siapa pembuat opini, bahkan



Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa saat berdialog dengan MenPANRB, Azwar Abubakar

juga memeriksa orang yang melaporkannya.

“Saya dapat kabar dari petugas penyelenggara pemilu di Hongkong



bahwasanya saat TPS ditutup datang sejumlah WNI yang mengaku belum mencoblos, namun di jari tangannya sudah terdapat bekas celupan tinta,” ungkap Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Ditambahkannya, menurut kabar yang ia terima jam 17.00 waktu Hongkong pencoblosan memang sudah selesai, namun karena antrian masih panjang, maka diperpanjang

hingga tiga puluh menit kemudian. Jadi apa yang diisukan belakangan menurut Agun sangat tidak mendasar.

“Saya tidak mau menuding, bisa jadi itu dilakukan dengan sengaja oleh salah satu kubu, namun bisa juga dimanfaatkan oleh penumpang gelap yang memanfaatkan situasi tersebut, kan kita tidak tahu,” kata Agun. (Ayu)/foto:rizka/parle/iw.

## RUU MD3 Akan Hindarkan DPR dari Korupsi

Wakil Ketua Pansus RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Fahri Hamzah mengatakan, revisi UU MD 3 yang sekarang ini adalah untuk memberikan penguatan kepada pribadi anggota DPR. Karena anggota Dewan adalah *elected official*- orang yang dipilih melalui pemilihan umum dengan biaya 15 Triliun.

“Karena itulah harus di *back up* dengan sistem yang membuat anggota DPR menjadi kuat. Mampu mengartikulasikan kehendak dan pikiran publik. Kita juga berkomitmen agar DPR sekarang ini coba terhindar dari korupsi,” ungkap Fahri menjawab pers sebelum Sidang Paripurna DPR, Selasa (8/7).

Hal itu dikatakannya menanggapi akan diputuskannya RUU MD3 dalam Sidang Paripurna yang dijadwalkan sebagai agenda keempat Sidang Paripurna DPR Selasa (8/7).

Menurutnya, dalam rangka memperkuat DPR tersebut, RUU MD3 juga akan mengubah Badan Kehormatan (BK) menjadi Mahkamah Kehormatan yang nantinya bisa melakukan proses pemecatan yang aturan acaranya akan segera dibuat.

Mengenai masalah alot yang dibahas terkait mekanisme pemilihan Pimpinan DPR, ia menjelaskan kepemimpinan di DPR itu menganut representasi bertingkat karena ada pasal 41 mengatur bahwa setiap anggota dewan yang terpilih punya hak untuk dipilih dan memilih. Hak dipilih dan memilih itu wujudnya adalah memang harus ada pemilihan dan sistem inilah yang dilaksanakan 2014 sehingga lebih



Wakil Ketua Pansus RUU MD3 Fahri Hamzah

aspiratif.

Selama ini kata Fahri, pimpinan alat kelengkapan Dewan dianggap drop-dropan, seperti dalam kasus Ruhut Sitompul di Komisi III diajukan sebagai calon Ketua, tetapi itu ditolak oleh anggota. Hal itu terjadi karena tidak dipilih, kalau ke depan nanti dipilih oleh anggota, akan lebih cocok.

“Jadi ini adalah demokrasi Versus drop-dropan. Kalau drop-dropan, ditaruh oleh partainya, padahal belum tentu terima para anggota dan belum tentu pas,” ujar Fahri menambahkan. (mp,mf)/foto:odjie/parle/iw.

## Pemerintah dan DPR Sepakat Optimalkan APBN

Pemerintah sependapat dengan seluruh fraksi di DPR untuk mengoptimalkan APBN sebagai stimulus perekonomian nasional. Dengan begitu, potensi pasar domestik meningkat yang secara otomatis pertumbuhan ekonominya juga ikut terdorong.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan M. Chatib Basri pada Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (8/7). Agenda rapat berisikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI soal RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2013.

“Selain itu, pemerintah juga sependapat agar di masa mendatang terus dapat dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan tertib dan disiplin anggaran, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyusunan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara,” papar Chatib.

Dalam pengantarnya, Chatib juga mengatakan, pemerintah selalu berupaya melaksanakan APBN untuk meningkatkan kemakmuran rakyat seperti diamanatkan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pada Rapat Paripurna sebelumnya, semua fraksi di DPR RI telah memberikan pandangannya terhadap RUU Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN 2013.

Soal terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 2013, pemerintah memberikan argumen bahwa semua itu dipengaruhi faktor eksternal, antara lain keputusan Bank Sentral AS yang melakukan penghentian stimulus moneter secara bertahap. Selain itu, ada pula faktor belum pulihnya perekonomian global, khususnya di Eropa, India, dan Tiongkok yang berdampak pada lemahnya ekspor nasional.



Menkeu Chatib Basri menyampaikan tanggapan Pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

Sementara dari faktor internal, pelemahan rupiah disebabkan tekanan neraca transaksi berjalan yang telah mengalami defisit sejak tahun 2012 akibat meningkatnya impor minyak seiring peningkatan konsumsi di dalam negeri. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

## Komisi II Serahkan DIM RUU Administrasi Pemerintahan



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa sesaat sebelum rapat RUU Administrasi Pemerintahan

Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa menilai UU Administrasi Pemerintahan sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Oleh karena itu setelah melewati tiga kali rapat kerja dengan pemerintah, Senin (7/7) Komisi II DPR RI menyerahkan kompilasi DIM dari berbagai fraksi di DPR.

“Kita tahu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik, semakin bebas dari praktek-prak-

tek korupsi dan sebagainya. Tentunya dibutuhkan sebuah kepastian jaminan dalam konteks hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu sendiri,” jelas Agun.

Ia mencontohkan di tataran executive baik ditingkat pusat maupun daerah banyak berimplikasi terhadap penyerapan anggaran yang sangat rendah, salah satu faktornya karena mereka tidak mendapatkan jaminan,

tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam konteks hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya secara objektif di dalam naskah akademik yang mereka ajukan itu soal diskresi.

Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat untuk mengambil langkah-langkah apabila tujuan yang ingin dicapai itu tidak mungkin lagi dilaksanakan, maka dia harus menunda, atau tujuan itu sudah sangat amat mendesak harus segera dilakukan maka dia harus segera mengambil langkah untuk bertindak.

“Nah, langkah-langkah diskresi ini sudah banyak sekali yang diperkarakan di penegak hukum. Karena melanggar aturan-aturan formil dari segi waktu yang harus diselesaikan. Sementara secara objektif mereka itu hanya akan menjalani tugas-tugas administratif itu tentu bukan hanya diatas kertas,” ungkap Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Agun menjelaskan sebut saja pembangunan sebuah jembatan yang harus selesai di bulan Februari atau di bulan Maret, tapi nyatanya untuk bisa selesai di bulan Maret ada gang-



guan alam, gangguan bencana, dan sebagainya. Maka mau tidak mau itu harus dimundurkan. Atau misalnya karena ada even politik nasional yang mengharuskan pembangunan itu dipercepat.

Masih banyak lagi diskresi-diskresi lain seperti pengalihan-pengalihan program yang setelah di cek ternyata tidak cocok atau lebih baik diberikan atau digeser ke program yang berbeda tapi tujuannya tercapai. Itu banyak hal-

hal yang seperti itu yang bermasalah di penegak hukum.

Hal itu yang pada akhirnya membuat mereka jadi khawatir karena sesungguhnya keuangan negara tidak ada yang dirugikan. Namun dari sisi aspek formal memang terlanggar waktu, prosedur dan sebagainya. Program dipindahkan. Dan itu yang mengakibatkan saat ini orang sering dibawa ke penegakkan hukum. Padahal mereka tetap merasa mereka tidak bersalah.

Tetapi opini publik mengatakan mereka tetap bersalah.

“Di UU Administrasi Pemerintah kelak, akan mengatur hal itu semua. Tentunya diskresi yang dibenarkan dalam UU ini kelak ada berbagai persyaratan di dalamnya, seperti prosedur dan ada tata caranya. Kalau melanggar aturan-aturannya itu ya tetap bisa pidana,” tegas Agun. (Ayu)/  
foto:rizka/parle/iw.

## RUU Kesehatan Jiwa Disetujui, Noriyu nyebur ke Kolam DPR

Usai RUU Kesehatan Jiwa diketok, Nova Riyanti yang akrab dipanggil Noriyu, akhirnya memenuhi khaulnya atau janjinya yang akan nyebur ke kolam DPR bila RUU ini disetujui.

Saat nyebur Nova mengenakan baju berwarna biru yang bertuliskan “*mental health*” dengan motif celana hijau bunga dirinya nyebur ditemani oleh 10 orang rekannya yang mengenakan kaos serupa.

Menurutnya, aksi ini merupakan bentuk luapan berbagai keresahan. “Ini merupakan ventilasi jiwa yang positif daripada melakukan hal yang lain,” terangnya se usai nyebur di kolam DPR RI.

Menurutnya, RUU kesehatan jiwa tidak mudah untuk diselesaikan. bahkan membutuhkan lima tahun. “Ini terakhir kalinya sejak tahun 1998 reformasi saya menduduki kembali kolam ini, dan sangat diluar prediksi apalagi saat itu saya sempat menjadi pimpinan Komisi, dan kita terus berkomitmen untuk RUU Kesehatan jiwa,” tandasnya.

Dia mengharapkan, pemerintahan baru bisa segera meneruskan amanah UU Kesehatan jiwa dengan menyusun berbagai peraturan. “Kita memiliki delapan provinsi yang punya RS jiwa, dimana seyogyanya setiap provinsi memiliki



Nova Riyanti Yusuf memenuhi janjinya nyebur ke kolam DPR

RS jiwa,” ujarnya.

Dia menambahkan, RUU kesehatan jiwa merupakan pondasi bagi kesehatan jiwa, baik secara fisik, mental ini sudah ada di muatan RUU ini. (si) foto: andry/parle/iw

## Komisi V Minta Pemerintah Beri Pelayanan Optimal Bagi Pemudik

Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi dari Fraksi PDIP meminta pemerintah bekerja optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang ingin mudik lebaran 2014 nanti.

“Pemerintah harus memberikan

perhatiannya kepada warga yang ingin mudik dan harus dijadikan puncak pelayanan bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya saat Komisi V DPR mengadakan Raker dengan Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Wakil Menteri PU Achmad Hermanto Dardak, dan jajaran Basarnas, Polantas

serta Airnav, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said, di Gedung Nusantara, Senin Sore, (7/6).

Menurutnya, pelayanan harus dilakukan tidak hanya di level Kementerian tetapi Presiden juga harus memberikan perhatiannya. “Jadikan



Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi

momentum penyelenggaraan arus mudik lebaran ini menjadi perhatian semua,” katanya.

Disisi lain, Yoseph mengapresiasi para petugas yang rela dan ikhlas menjalankan tugasnya memberikan pelayanan untuk kelancaran mudik lebaran 2014 mendatang, “Mereka yang bertugas itu harus diberikan insentif semacam lebur, selain itu, kriteria penyelenggaraan pelayanan itu terletak dari beberapa faktor seperti selamat, aman dan nyaman, kalau itu semakin meningkat tentunya pemer-

intah sukses dalam menyelenggarakan pelayanan mudik lebaran 2014 nanti,” ujarnya.

Sementara anggota Komisi V DPR Hetifah (F-PG) meminta pemerintah memperhatikan angkutan laut pasalnya, angkutan ini juga masih banyak peminatnya bahkan mereka juga harus mengantri sangat lama. “Banyak terjadi penumpukan penumpang saat peninjauan ke Jawa Timur lalu, bahkan mereka menginap berhari-hari di Pelabuhan untuk mudik,” katanya. (si) foto: rizka/parle/iw.

## Pengadaan Pesawat MA 60 Sarat Kejanggalan

Pengadaan pesawat MA 60 oleh PT. Merpati Nusantara Airlines sarat dengan kejanggalan. BPK harus secepatnya lakukan audit investigatif. Bila ditemukan fakta yang menyalahi hukum, tentu penegak hukum harus juga segera bertindak.

Demikian penegasan Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satria Wardhana (F-Hanura) usai raker dengan Meneg BUMN Dahlan Iskan, Senin (7/7). Temuan ini merupakan poin kesimpulan penting dari Panja Komisi VI DPR RI soal Merpati. “Kami menemukan banyak kejanggalan, tapi bukan kapasitas kami untuk melakukan investigasi. Komisi VI merekomendasikan supaya kasus pengadaan MA 60 ini, dibawa ke ranah hukum,” ungkap Erik.

Komisi VI berharap proses hukum benar-benar tuntas dilakukan. Sebagai alat produksi perusahaan plat merah itu, mestinya MA 60 bisa efektif dimanfaatkan. Namun, proses pengadaannya di luar bisnis plan, sehingga



Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satria Wardhana

menimbulkan banyak masalah. “Saya kira ini mutlak harus diselesaikan melalui proses hukum, karena jelas-jelas sudah membebani keuangan negara,” tandas Erik.

Selain itu, sambung Erik, Merpati juga perlu merestrukturisasi utang

jangka pendek dan panjangnya. Bahkan, utang kepada karyawannya juga belum dilunasi. Merpati sudah dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Perlu reformasi menyeluruh dengan mengganti jajaran direksinya.

“Direksi sekarang sudah tidak cakap lagi, baik secara moral maupun teknis. Dan itu harus segera diganti. Direksi baru itu nanti segera menghidupkan kembali AOC (Air Operating Certificate) yang dikeluarkan oleh Kemenhub yang sekarang sudah beku. Itu tugas direksi yang baru,” harap Erik.

Sementara menyoal tiga fraksi yang melakukan walkout dari rapat Panja Komis VI, Erik menilai, situasi politik terkini sedang panas, sehingga mempengaruhi keputusan politik di DPR. “Saya khawatir ada situasi politik di luar DPR yang ikut mempengaruhi. Pada awalnya mereka setuju, tetapi ada persepsi lain tentang itu. Padahal, rekomendasi itu disusun bersama oleh Komisi VI.” (mh)/foto:odjie/parle/iw.

## Komisi V Desak Pemerintah Tingkatkan Infrastruktur Hadapi Lebaran 2014

Komisi V DPR mendesak Pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan sarana fasilitas menghadapi arus lebaran 2014 mendatang.

Hal itu mengemuka saat Komisi V DPR mengadakan Raker dengan Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Wakil Men-

teri PU Achmad Hermanto Dardak, dan jajaran Basarnas, Polantas serta Airnav, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said, di Gedung Nusantara, Senin Sore, (7/7).

“Perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah terkait



Pimpinan Komisi V DPR saat raker dengan Menteri Perhubungan

daerah yang berasal dari timbunan sehingga menyebabkan rembesan di jalan sekitar Pantura, karena memang tanahnya labil,” ujar Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rendy Lamadjido.

Menurutnya, sekuat apapun beton tentunya dapat membuat jalan cepat rusak karena banyaknya rembesan tersebut. “Selain itu persoalan utama lainnya di jalan yaitu semakin cepatnya jumlah korban meninggal di jalan raya meskipun sudah mengalami penurunan drastis tetapi kecepatan kecelakaan semakin meningkat,” ujarnya.

Dia mengaku heran mengapa pemerintah terkesan mem-

biarkan pengguna roda dua ini. Karena konsekuensinya, jika rata-rata tiap tahun yang meninggal 30 ribu orang anak muda maka dikhawatirkan pada tahun 2025 kita akan kesulitan generasi penerus. “Perlu pembenahan frontal karena itu saya minta kepada Polantas menyikapinya karena hampir 70% kematian merupakan angkatan muda, yang menggunakan roda dua,” jelasnya.

Selain itu, dia menegaskan agar pemerintah segera mengantisipasi ketersediaan tiket dan kepastian berangkat dari para pemudik tersebut. “Ini mengapa pemerintah telat mengantisipasi sesuatu bahkan Pantura itu sudah over kapasitas mengapa tidak mencari alternatif seperti lintas tengah, padahal ini bisa menjadi alternatif,” ujarnya.

Persoalan lainnya, lanjut Rendy, yaitu banyaknya pasar tumpah di berbagai daerah. Ini juga merupakan sesuatu yang kerap terjadi tiap tahun. “Kita ini punya UU karena memang bahu jalan tidak boleh digunakan, karena itu kita perlu *law enforcement* disini,” jelasnya.

Disisi lain, polisi perlu melakukan rekayasa lalu lintas yang mendalam dan menyeluruh terkait kemacetan di Pantura. “Seharusnya ada anggaran untuk rekayasa lalu lintas, padahal masalah juga bisa bersumber dari pihak kepolisian sendiri,” katanya.

Anggota DPR dari F-PKS Abdul Hakim mengatakan, pemerintah harus kerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik dimana indikatornya yaitu penurunan tingkat kecelakaan korban jiwa dengan cara ini kita harapkan evaluasi *roadmap to zero* dapat tercapai lagi. “Selain itu perlu adanya peningkatan sarana, prasarana termasuk perubahan budaya dari pemudik itu sendiri,” ujarnya. (si)/foto:rizka/parle/iv.

## Penguatan Kebijakan Fiskal Percepat Pertumbuhan Ekonomi

“Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan” menjadi tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2015. Hal itu disampaikan dalam laporan Badan Anggaran DPR mengenai hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun anggaran 2015 yang dibacakan oleh Wakil Ketua Banggar Yasonna Laoly.

“Strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional agar memenuhi aspek keadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal,” jelas Yasonna pada Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (8/07).

Untuk dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, tambah Yasonna, maka Pemerintah perlu melakukan



Wakil Ketua Banggar DPR Yasonna Laoly menyerahkan laporan ke Menkeu

beberapa langkah. Langkah pertama yang diambil adalah mengendalikan defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapat dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.

“Langkah kedua melalui penurunan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang aman dan terjaga atau *manageable*, *net negative flow*, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif,” tambah Politisi PDI Perjuangan ini.

Langkah berikutnya, pemerintah harus mengendalikan resiko fiskal dalam batas aman, melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, *debt service ratio* terhadap pendapatan dalam negeri, rasio utang terhadap PDB, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur,” urai Yasonna.

Terkait dengan kebijakan di bidang pendapatan negara,

arah kebijakan perpajakan dalam tahun 2015 adalah kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi, intensifikasi, dan penggalian potensi. Selain itu, tarif cukai juga menjadi kebijakan dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai, yaitu penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

“Sedangkan kebijakan utama untuk mengoptimalkan penerimaan Sumber Daya Alam migas dalam tahun 2015 melalui peningkatan produksi migas yang bersumber dari peningkatan produksi lapangan, pencapaian target *lifting* minyak mentah dan *lifting* gas bumi, mengupayakan terciptanya efisiensi *cost recovery*, dan memperbaharui harga jual gas,” imbuh Yasonna.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, asumsi dasar RAPBN 2015 disepakati pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6,0 persen. Sedangkan, *lifting* minyak dan gas bumi disepakati di angka 2.030 sampai 2.160 ribu barel setara minyak per hari. (sf,pi)/foto:odjie/parle/iw.

## Baleg Setujui RUU Perubahan UU PA

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan usulan inisiatif Komisi VIII DPR RI. Hal tersebut menjadi keputusan rapat pleno Baleg, Senin (7/7) di Senayan, Jakarta.

“RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 ini semata-mata untuk melindungi anak Indonesia secara utuh dari segala macam bentuk kekerasan baik yang dilakukan oleh orang dewasa atau yang dilakukan oleh anak sendiri,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Amalia Hanifa.

Dijelaskan Ledia, hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian disepakati dalam rapat Panja, secara garis besar Perubahan antara lain, memasukkan beberapa pasal untuk memperkuat perlindungan terhadap anak maupun keluarga, serta terbebasnya anak dari perlakuan diskriminatif.

“Kami juga telah melakukan perbaikan teknik *legal drafting* dan penyempurnaan perumusan berbagai pasal terkait definisi anak, anak penyandang disabilitas, perlindungan khusus, pemerintah dan pemerintah daerah serta menambahkan satu ketentuan umum terkait definisi kekerasan,” jelas Ledia.

Selain itu dalam perubahan UU ini juga memasukkan dalam pasal 9 ketentuan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dan satuan pendidikan agama dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan atau pihak lain.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi VIII, Mahrus Munir, RUU



Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Amalia Hanifa menandatangani perubahan UU tentang Perlindungan Anak

ini mengatur dan menyempurnakan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak yang menjadi korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

“Dengan kata lain ada sekitar tujuh butir perubahan yang telah kami sepakati dalam bentuk Panja Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi tentang RUU perubahan tentang UU No.23 Tahun 2002,” ungkap Mahrus. (Ayu/Br;Put)/foto:odjie/parle/iw.



# Kebijakan Belanja Dukung Pemerintah Efektif Efisien



Wakil Ketua Banggar DPR Yasonna Laoly menyerahkan laporan Banggar kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

Dalam laporan Badan Anggaran mengenai hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2015, Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2015 diarahkan sejalan dengan misi dan arah pembangunan yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar Yasonna Laoly pada Sidang Paripurna, Gedung Nusantara II, Selasa (8/07).

“Kebijakan juga harus mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan efisien, antara lain dengan melanjutkan reformasi

birokrasi pengendalian belanja pendukung pelaksanaan pemerintah, meningkatkan kualitas belanja negara, menyempurnakan penerapan *Performance Based Budgeting* (PBB) dan *Medium-Term Expenditure Framework* (MTEF),” jelas Yasonna.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, perlu diambil kebijakan dengan mendukung pembangunan konektivitas nasional dan logistik distribusi, serta modal transportasi umum dengan tetap mengembangkan

mekanisme pendanaan alternatif (*creative financing scheme*) dan kerjasama pemerintah swasta bidang infrastruktur.

“Kebijakan berikutnya, dengan mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka ketahanan pangan, air, dan energi, serta meningkatkan efektifitas kebijakan subsidi yang tepat sasaran melalui pengendalian besaran subsidi dalam bentuk pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Kebijakan juga perlu meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas,” imbuh Yasonna.

## Kendalikan risiko dan kesinambungan fiskal

Dalam kesempatan ini, Yasonna juga menjelaskan arah defisit anggaran tahun 2015 adalah untuk memperkuat stimulus fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal.

“Defisit anggaran tahun 2015 direncanakan berkisar 1,7%-2,5% terhadap PDB. Namun Fraksi PDIP berpendapat bahwa defisit anggaran tahun 2015 berkisar 1% - 2% dari PDB,” tutup Yasonna. (sf,pi)/foto:andri/parle/iw.

## Penegakan Hukum Lamban, Komisi III Bentuk Panja JIS

Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) yang akan mengawal proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap siswa di Jakarta International School (JIS). Kesepakatan itu diambil setelah menghimpun masukan dari sejumlah pihak termasuk melakukan kunjungan lapangan ke JIS.

“Pembentukan Panja JIS karena masalah pedofilia ini telah meresahkan masyarakat dan proses penyidikannya ber-

larut-larut. Kasus ini terjadi di sekolah internasional di Jakarta yang tentunya menjadi sorotan dunia. Pembentukan Panja dalam rangka fungsi pengawasan dewan, mendorong semua pihak lebih serius menangani kasus ini,” kata anggota Komisi III Harry Witjaksono usai rapat internal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/14).

Sejauh ini lanjutnya Komisi III sudah meminta penjelasan dari Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini, men-



Anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono



dengar keterangan orang tua korban dan melakukan kunjungan spesifik ke lokasi sekolah JIS. Harry menekankan penanganan yang tepat, sanksi yang menjerakan diperlukan agar kasus seperti ini tidak terjadi di tempat lain.

Bicara pada kesempatan yang berbeda anggota Komisi III dari FPDIP M. Nurdin menyebut pilihan membentuk panja lebih memungkinkan dari pada

pansus (panitia khusus). Apabila diperlukan Panja JIS yang dibentuk Komisi III bisa berkoordinasi dengan komisi terkait yang juga membantu panja sesuai dengan bidang mereka.

“Kita ingin mengungkap permasalahan kenapa kok sepertinya tertahan. Kita ingin tahu apa hambatannya, apa masalah pidana atau non pidana. Panja bisa segera bekerja apabila diperlukan

kita bisa bersidang pada masa reses nanti,” tuturnya.

Selain Komisi III yang membidangi masalah hukum, komisi lain juga memberi perhatian pada kasus ini diantaranya Komisi VIII yang fokus pada perlindungan pada anak dan Komisi X yang membidangi masalah pendidikan. (iky)/foto:iwan armanias/parle.

## Risau Putusan MK, Paguyuban Advokat Laporkan Komisi III

Komisi III DPR RI menerima pengaduan Paguyuban Advokat Peduli Konstitusi (PAPK) yang merisaukan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu Legislatif. Mereka meminta komisi hukum memberi perhatian sebagai pihak yang turut memilih Hakim Konstitusi dan sebagai mitra kerja.

“Kita menerima pengaduan dari paguyuban advokat ini dan akan kita tindak lanjuti aspirasi mereka yang belum puas dengan putusan MK dalam mengelola sengketa partai,” kata Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/14).

Politisi Fraksi PKS ini meminta PAPK melengkapi laporan dengan berkas dan *summary* pendukung agar permasalahannya lebih mudah dipahami. Menurutnya pengaduan yang disampaikan paguyuban ini dapat ditindaklanjuti pada rapat konsultasi dengan



Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf

MK yang telah dijadwalkan pada Selasa (8/7).

Sementara itu Ketua PAPK Utomo Karim menjelaskan dari 914 sengketa dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Majelis Hakim MK hanya mengabulkan 21 permohonan. Dalam memutuskan MK menurutnya hanya terfokus pada angka perolehan suara. Saksi yang

dibolehkan hadir di persidangan juga dibatasi maksimal 3 orang, jelas tidak memadai untuk luasnya daerah pemilihan seorang caleg DPR.

“Kami sebagai pengacara sudah berupaya menghadirkan berkas berton-ton dalam persidangan tetapi tidak menjadi pertimbangan oleh majelis hakim. Pada akhirnya kami menilai MK telah meligitimasi kecurangan yang terjadi dalam Pemilu Legislatif lalu,” tandasnya.

Pada bagian lain ia mengkhawatirkan keputusan MK dalam uji materi UU Pilpres yang memutuskan pemenang adalah kandidat dengan suara terbanyak dan menghapus syarat sebaran 20 persen di lebih dari setengah jumlah provinsi. Putusan ini menurutnya membahayakan NKRI. “Dalam kondisi ini kami mempertanyakan kenegaraan hakim MK,” pungkask dia. (iky)/foto:iwan armanias/parle.

## Baleg Himpun Masukan RUU Penyandang Disabilitas

Badan Legislasi (Baleg) DPR menghargai langkah yang dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan yang telah menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Kehadiran Baleg ke Propinsi ini tepat sekali sebab belum lama ini Makassar menjadi tuan rumah Olimpiade Penyandang Disabilitas, sehingga menjadi tambahan inspirasi bagi penyusunan RUU Penyandang Disabilitas.

sunan RUU Penyandang Disabilitas.

“Kantor ini juga telah memberi akses kemudahan bagi penyandang disabilitas, sehingga perlu dicontoh oleh daerah lain,” ungkap Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR Didi Irawadi Syamsudin saat menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur

Sulsel Agus Arifin Nu'mang dan jajaran serta sejumlah organisasi penyandang disabilitas di kantor Pemprov Sulsel, Makassar, Jumat (4/7).

Menurut Didi, maksud kunker adalah untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan RUU Penyandang Disabilitas yang merupakan pengganti UU No.4



tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. UU No.4/1997, kata Didi Irawadi, disusun berdasarkan paradigma belas kasih. Model penanganannya terbatas pada upaya rehabilitasi kerusakan/ke-lainan (*medical model*).

Selama 17 tahun pemberlakuan UU tersebut, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum optimal. Cara pandang yang masih didominasi oleh rasa belas kasih, dirasa tidak relevan, sehingga mengganti UU No.4/1997 menjadi RUU tentang Disabilitas merupakan suatu keniscayaan.

Dalam acara ini Baleg mendapat banyak masukan, diantaranya dari pejabat dari UPT Kemensos Aladin yang mengharapkan perlu ada ketegasan soal penyiapan akses. “Bagaimana memahami penyandang disabilitas, sehingga secara keseluruhan aksesnya perlu disiapkan,” katanya.

Bambang Permadi Surya Kelana, Ketua Penyandang Disabilitas Indonesia Sulsel, menyoroti belum masuknya Komisi Disabilitas Nasional dalam naskah RUU. Padahal itu adalah amanah yang harus dimasukkan, sama dengan konvensi perempuan dan anak, ada komisinya sendiri. “Saya minta Baleg mengakomodir ini,” jelasnya.

Ia juga menyoroti ketentuan Pasal 4 (3) terkait Ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) mewajibkan pemerintah untuk selalu



Ketua Tim Kunker Baleg DPR Didi Irawadi Syamsudin berjabat tangan dengan Wagub Sulsel Agus Arifin Nu'mang

berkonsultasi dengan organisasi disabilitas atau organisasi yang mewakili. Padahal kata Bambang, di banyak kabupaten belum ada organisasi disabilitas lalu bagaimana mau berkonsultasi kalau organisasinya belum ada. “Saya berharap semangat CRPD ini betul-betul masuk dalam rumusan UU, “katanya dengan memberikan naskah RUU Disabilitas yang disusunnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Baleg Didi Irawadi menyatakan terima kasih atas masukannya dan bisa disampaikan secara tertulis ke Panja RUU

Penyandang Disabilitas, Baleg DPR. Meski para anggota Dewan sekarang ini berada pada ujung pengabdian, tetapi ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa ini yaitu RUU bagi Penyandang Disabilitas. Mereka harus dilihat sebagai manusia utuh yang memiliki hak dan mampu mendapatkan hak tersebut serta membuat keputusan terhadap hidup mereka, termasuk berpartisipasi penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi pembangunan seperti halnya anggota masyarakat lainnya. (mp)/foto:mastur/parle/iw.

## Komisi IV DPR Nilai Pulau Nipa Batam Strategis

Komisi IV DPR RI menyoroti Pulau Nipa yang nyaris hilang satu dekade yang lalu, dikarenakan pasir di sekitar pulau disodot dan diekspor ke negara tetangga guna proyek reklamasi yang sangat merugikan Indonesia.

Hal ini diungkapkan Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi IV DPR RI, Romahurmuziy dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) saat melakukan kunjungan langsung ke Pulau Nipa, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (4/7) lalu.

“Komisi IV memandang penting peran Pulau Nipa karena pulau ini merupakan pulau strategis bagi kedaulatan negara, yang menjadi acuan pengukuran dan penetapan *media line*



Tim Kunker Spesifik Komisi IV DPR meninjau Pulau Nipa

pada perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura pada tahun 1974,” kata Romahurmuziy yang akrab disapa Romi.

Menurutnya, Pulau Nipa yang berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional mempunyai potensi ekonomis cukup besar, yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertahanan keamanan berbasis ekonomi.

Politisi dari F-PPP ini berharap Pulau Nipa ini tidak saja menjadi kawasan pertahanan, namun juga harus dikembangkan sebagai kawasan ekonomi.

Di tempat yang sama, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad membenarkan, Pulau Nipa nyaris tenggelam. Pulau Nipa yang pada awalnya memiliki luas sekitar 60 Ha mengalami abrasi parah hingga luasnya hanya tersisa sekitar 700 m<sup>2</sup>.

Untuk menyelamatkan eksistensi Pulau Nipa maka dilakukan reklamasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2004. Reklamasi di Pulau Nipa terus dilakukan hingga tahun 2008 untuk menjaga agar pulau tidak tenggelam, mengingat pulau ini memiliki arti yang sangat strategis bagi kedaulatan negara.

Menurutnya, pulau ini tidak berpenduduk secara tetap, hanya ditempati pasukan Marinir, TNI-AL dan pasukan dari Angkatan Darat yang bertugas secara berkala di Pulau Nipa.

Saat ini Pulau Nipa telah direklamasi hingga luasnya sekitar 50 Ha. Sebagai salah satu pulau-pulau kecil terluar yang sangat strategis, pengembangan Pulau Nipa diperuntukan bagi aktivitas pertahanan keamanan dan pengembangan ekonomi (pertahanan keamanan berbasis ekonomi).

“Dari sisi pertahanan keamanan, saat ini di Pulau Nipa telah dibangun pangkalan TNI yang terdiri dari Angkatan Darat dan Marinir Angkatan Laut. Dari sisi ekonomi, telah disusun blue print pengembangan Pulau Nipa untuk pembangunan oil storage dan transit anchorage area. Sedangkan dari sisi lingkungan, telah diperuntukkan laguna sekitar 6 Ha untuk pengembangan kawasan mangrove,” jelasnya.

Ditambahkan Sudirman Saad, status lahan pasca reklamasi di Pulau Nipa adalah Barang Milik Negara (BMN) yang hak pengelolannya (Hak Pakai) diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertahanan. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

## Komisi VI Serahkan Laporan Panja Merpati

Komisi VI DPR RI menyerahkan hasil laporan Panitia Kerja (Panja) menyangkut investigasi Merpati Nusantara kepada Menteri Negara (Meneg) BUMN. Banyak fakta terungkap dalam laporan tersebut.

Rapat kerja dengan Meneg BUMN Dahlan Iskan, Senin (7/7), sempat diskors beberapa menit, karena ada fraksi yang menyatakan tidak setuju dengan isi laporan Panja tersebut. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Erik Satria Wardhana akhirnya menyerahkan laporan tersebut kepada Meneg BUMN tanpa dibacakan. F-PDI Perjuangan, F-PAN, dan F-PPP menyatakan *walkout* dari ruang rapat dan tidak bertanggung jawab atas pengambilan keputusan soal Merpati.

Laporan Panja Komisi VI tersebut berisi fakta dan temuan penyimpangan di internal maupun eksternal yang dilakukan manajemen PT. Merpati Nusantara Airlines. Penyimpangan internal yang terungkap, misalnya, soal pengangkatan Haryo P Surjokusumo sebagai direktur produksi dengan menggunakan titel *captain* penerbang. Padahal, status tersebut tidak dapat dibuktikan. Bahkan, sejak Oktober sampai kini, yang bersangkutan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Penyimpangan lainnya soal pengangkatan direktur niaga, direktur teknik, dan direktur operasi dengan menggunakan istilah *associate directors* tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Koordinasi antardireksi juga dinilai lemah. Selain



Pimpinan Komisi VI DPR menyerahkan Hasil Laporan Panja Merpati kepada Meneg. BUMN

itu, manajemen Merpati tidak mengontrol dan tidak mengetahui secara tepat aset bernilai tinggi di Merpati.

Sementara temuan eksternal yang bermasalah adalah penyewaan mesin CFM56-3 (Boeing 737) ke pihak Trigana tanpa persetujuan dari direksi. Penyewaan hanggar ke Lion Air dengan nilai di bawah pengaturan tarif hanggar. Pesawat kelas ATR yang terparkir per pesawat per hari menurut SKEP adalah USD 330. Sementara manajemen menyewakannya seharga Rp1.500.000. Begitu pula pesawat kelas Boeing disewakan hanggarnya Rp1.500.000. Padahal, mestinya USD 660. (mh)/foto:odjie/parle/iw.



# RUU Panas Bumi Disetujui di Pembicaraan Tingkat I

Rancangan Undang-undang Panas Bumi disetujui di Pembicaraan Tingkat I pada raker antara Pansus RUU Panas Bumi dengan Pemerintah. Direncanakan, hasil persetujuan ini akan dibawa ke Sidang Paripurna mendatang untuk diambil keputusan Pembicaraan Tingkat II. Hal itu disampaikan Ketua Pansus RUU Panas Bumi Nazarudin Kiemas, usai raker dengan agenda Pembicaraan Tingkat I RUU Panas Bumi dengan Pemerintah.

Dalam kesempatan raker ini, hadir dari pihak pemerintah yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Hukum dan HAM. Rapat berlangsung di Ruang KK I, Gedung Nusantara, Jumat (4/07) malam.

“Apakah RUU yang telah kita bahas ini dapat disetujui untuk menjadi draft final Pembicaraan Tingkat I untuk selanjutnya dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna?” tanya Nazarudin kepada seluruh anggota Pansus yang hadir. Jawaban “setuju” secara serentak pun terdengar dari seluruh anggota dewan yang hadir.

Sebelum RUU ini disetujui, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Ada beberapa catatan dan harapan yang disampaikan oleh fraksi. Diantaranya, Fraksi PKS mengharapkan RUU Panas Bumi dapat mendukung pedoman *roadmap* energi nasional hingga 2050, yang telah dirumuskan Dewan Energi Nasional.



Pimpinan Pansus RUU Panas Bumi

“Pada tahun 2025, peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit harus mencapai 23% dari total konsumsi energi nasional. Dan pada tahun 2050 paling sedikit naik paling sedikit 31%, sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Sehingga ketergantungan kita terhadap energi fosil dengan adanya panas bumi ini dapat diminimalkan,” jelas juru bicara dari Fraksi PKS Rofi’ Munawar.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap kegiatan pengusahaan panas bumi tidak merusak lingkungan hidup yang sudah ada. Jika ada kegiatan perusakan lingkungan, maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

“Peran serta masyarakat meliputi menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pengusahaan panas bumi, dan menyampaikan laporan terjadinya bahaya pencemaran atau perusakan di wilayah kegiatan peng-

usahaan panas bumi, untuk peran serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan panas bumi,” jelas Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Irvansyah.

Ditemui usai raker yang selesai pada pukul 23.00 WIB, Nazarudin menyatakan dengan disetujuinya RUU ini, maka hambatan yang selama ini menjadi kendala dalam mengembangkan energi panas bumi sudah tidak ada lagi. Pemerintah sudah memiliki acuan dalam mengolah potensi energi terbarukan ini.

“Dengan adanya UU ini, berarti hambatan dalam pembangunan panas bumi selama ini yang telah sekian tahun terhambat, dapat berjalan. Mudah-mudahan, sekarang kita baru produksi sebesar 4%, dengan adanya UU ini bisa mencapai rata-rata 600 megawatt per tahun,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

## DPR Kecam Aksi Kekerasan Israel di Gaza

DPR RI mengecam keras serangan membabi buta Israel ke sejumlah lokasi di Gaza, Palestina yang menimbulkan korban warga sipil bahkan anak-anak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mengeluarkan pernyataan

tegas menyikapi kondisi ini.

“Konstitusi mengamanatkan kita perlu bersikap membela keadilan, kemerdekaan. Seluruh fraksi di DPR tidak ada yang berbeda, semua mendukung

kemerdekaan Palestina. Kita meminta pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan tegas menyikapi perkembangan ini,” kata Koordinator Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina, Al Muzzammil Yusuf di Gedung DPR,



Wakil Ketua Komisi III DPR AI Muzzammil Yusuf

Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).

Ia juga menyampaikan keprihatinan terhadap Negara-negara Barat yang dinilai lamban bersikap dan menerapkan standar ganda terhadap kekerasan yang dilakukan Israel. “Ini menunjukkan *double standard* mereka dalam memberikan penilaian terhadap pelanggaran HAM. Kekerasan di Mesir, Irak mereka reaktif tetapi terhadap Israel mereka diam saja,” tandas Muzzammil yang juga Wakil Ketua Komisi III ini.

Sementara itu bicara pada kesempatan berbeda Wakil Ketua Komisi II Khatibul Imam Wiranu meminta pemerintah mengefektifkan lobi lewat forum internasional seperti Asean, OKI dan G20. Indonesia harus bergerak atas nama kemanusiaan dan upaya menyelamatkan Masjidil Aqsa sebagai simbol perdamaian.

“Peran Indonesia diperlukan. Pemerintah harus lebih aktif, ada forum untuk itu Asean, OKI, G20. Saya memang menyarankan kepada pemerintah SBY untuk membuat pernyataan secara

formal, kutukan kepada Israel,” tegas politisi FPD ini.

Khatibul yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Palestina bersama BKSAP DPR berharap serangan yang terjadi di Gaza bukan awal dari pertempuran besar di kawasan ini. Laporan dari sejumlah media menunjukkan Hamas membalas serangan Israel dengan menembakkan roket ke wilayah di Israel. Namun rudal sistem pertahanan Israel yang lebih canggih dikatakan mampu menghadang roket tersebut. (iky) foto: naefurodjie/parle/iw



RS Indonesia di Gaza, Foto: Mer-C

## DPR Apresiasi Pilpres Berlangsung Damai

DPR RI mengapresiasi positif perhelatan Pemilihan Umum Presiden berlangsung damai dan tertib. Pendapat itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan IV, di Gedung Nusantara II, Kamis, (10/7).

“Kita patut bersyukur kehadiran Allah SWT, bahwa sepanjang hari Rabu 9 Juli 2014, bangsa Indonesia telah melaksanakan perhelatan demokrasi yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Menurutnya, hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden akan menentukan arah kehidupan negeri kita untuk lima tahun ke depan. “Di dalam alam demokrasi mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dapat dibenarkan, tetapi bukan untuk saling memunculkan perpecahan,” katanya.

Marzuki Alie mengatakan, dalam masa kampanye, memang ada beberapa kasus yang cukup memprihatinkan karena adanya sikap yang berseberangan antar pendukung.



Ketua DPR RI Marzuki Alie

“Alhamdulillah, proses Pilpres telah berlangsung dengan aman, lancar dan terkendali. Pilpres ini menjadi sarana bagi proses pendidikan masyarakat dalam berdemokrasi dan mengimplementasikan nilai-nilai universal demokrasi yang berupa kesetaraan, keadilan, hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara melalui cara-cara yang beradab,”

paparnya.

Dia menegaskan, angka yang diperoleh barulah dari hasil hitung cepat. Karena itu, kita masih menunggu perhitungan resmi yang akan diumumkan oleh KPU sepuluh hari ke depan, yang akan menetapkan Presiden/Wakil Presiden terpilih untuk kurun waktu 2014-2019.

“Setelah pengumuman resmi, semua pihak diharapkan menerima hasil pilihan rakyat dengan baik, dengan tetap

menjaga situasi kondusif yang merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa,” tandasnya.

Dia menambahkan, masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan yaitu mengawasi dan memantau perhitungan suara, yang harus dilakukan dengan cermat, jujur dan transparan. “Kita tidak menginginkan terjadinya kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya. (si) foto: [naefurodjie/parle/iw](#)

## DPR Setujui Delapan RUU Pada Masa Sidang IV

Dalam Pelaksanaan fungsi Legsilasi, Dewan telah menyetujui delapan RUU baik RUU Prioritas Prolegnas maupun RUU Kumulatif Terbuka. “DPR telah menyelesaikan RUU tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang IV, di Gedung Nusantara II, Kamis, (10/7).

Menurutnya, UU ini dimaksudkan juga untuk menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan hak azasi manusia; memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,” terangnya.

Dia mengatakan, DPR juga telah menyetujui RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) untuk disahkan menjadi UU, yaitu pembentukan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. “Dewan berharap, pembentukan daerah otonomi baru ini harus benar-benar dapat dioperasionalkan dan dikawal dengan baik, dapat mendo-



Ketua DPR RI Marzuki Alie

rong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan dapat memberikan kemampuan daerah dalam pemanfaatan potensi di daerahnya,” katanya.

Selanjutnya, yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik India telah disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 24 Juni 2014. “Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini, Dewan berharap kedua negara dapat saling mendukung dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*),” jelasnya. (si)/foto: [iwan armanias/parle](#).

## Paripurna Setujui Perubahan UU Perlindungan Anak

Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (10/7) menyetujui RUU Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan usulan inisiatif Komisi VIII DPR RI, untuk kemudian disahkan oleh Presiden. Ini sejalan dengan tujuan bersama untuk memberikan perlindungan kepada anak Indonesia

dari segala macam bentuk kekerasan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo yang saat itu memimpin rapat.

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR RI, Sumarjati Arjoso mengungkapkan apresiasinya atas persetujuan dari hasil kerja kerasnya selama ini ber-

sama dengan anggota Komisi VIII lainnya. Kendati demikian yang terpenting dari semuanya adalah pengimplementasian dari UU tersebut.

“Ada beberapa perubahan atau penyempurnaan yang tercantum dalam RUU tentang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 ini, baik mengenai definisi

anak, bentuk kekerasan maupun perubahan hukuman yang tentunya ditujukan untuk menimbulkan efek jera,” jelas Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.

Sebagaimana tertera dalam RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 yang disusun Komisi VIII DPR RI, diantaranya menyisipkan satu pasal diantara pasal 77 dan Pasal 78, yakni Pasal 77 A tentang ketentuan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan



Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso

denda paling banyak 1 Miliar untuk setiap orang yang melanggar pasal 45 A.

Pasal 45 A sendiri berisikan pelanggaran bagi setiap orang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali alasan yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menurut Sumarjati dapat berarti bahwa perlindungan anak dilakukan negara sejak ia dalam kandungan. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

## DPR Setujui RUU Kerja Sama Industri RI-Turki



Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menyerahkan laporan kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro

Pembahasan RUU Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki berlangsung secara kritis, mendalam, komprehensif serta terbuka. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya dalam laporan Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tersebut di Gedung DPR Kamis (10/7).

Dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Tantowi Yahya mengemukakan, dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai

bentuk perjanjian internasional, termasuk kerja sama di bidang industri pertahanan, dan salah satu negara mitra kerja sama strategis Indonesia dalam bidang industri pertahanan adalah Turki

Menurut politisi Partai Golkar ini, kerja sama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Turki diwujudkan dalam bentuk persetujuan tentang kerja sama industri pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki yang telah ditandatangani di Ankara pada tanggal 29 Juni lalu.

Beberapa bagian penting dalam persetujuan tentang kerja sama pertahanan kedua negara dalam bidang industri pertahanan ini yang meliputi, penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi penelitian bersama, pengembangan produksi dan proyek modernisasi, bantuan timbal balik dalam bidang produksi dan pengadaan produk industri dan jasa pertahanan.

Selain itu, penjualan produk akhir, pertukaran informasi ilmiah dan teknis, partisipasi dalam pameran industri pertahanan dan simposium, serta penjualan atau pembelian yang saling menguntungkan.

Terkait dengan persetujuan tersebut, maka disepakati pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama industri pertahanan, kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat rahasia. Juga disepakati komitmen para pihak untuk mengedepankan kepentingan, keamanan, dan integritas masing-masing negara.

Dalam hal penyelesaian sengketa, dilakukan secara damai melalui negosiasi para pihak dalam Komite Bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik. (Spy)/foto:iwan armanias/parle.

# Pimpinan Lembaga Negara Harapkan Pemilu Demokratis

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pimpinan lembaga negara mengadakan rapat konsultasi menghadapi pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang digelar 9 Juli 2014. Pertemuan berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV MPR RI, Senin (7/07).

Selain Presiden, hadir pada rapat tersebut Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua BPK Rizal Djalil, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Kapolri Jenderal Polisi Sutarnan, dan para Wakil Ketua MPR.

Usai pertemuan, Sidarto menyatakan rapat konsultasi pimpinan lembaga negara ini untuk mewujudkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang demokratis dan konstitusional.

“Pertemuan konsultasi pimpinan lembaga negara hari ini dilaksanakan dalam rangka mengawal momentum penting agenda nasional pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014, agar berjalan secara demokratis dan konstitusional, serta aman dan damai,” jelas Sidarto.

Sidarto menjelaskan, Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara sepakat untuk memberikan dukungan penuh sesuai dengan tugas dan kewenangannya terhadap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam satu putaran, secara damai dan bermartabat sehingga dapat menghasilkan pimpinan nasional yang kuat dan memperoleh dukungan rakyat.

“Kepada seluruh masyarakat Indonesia, untuk menyukseskan penyelenggaraan pilpres, dengan berpartisipasi hadir menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah Pimpinan Lembaga Negara

adil, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya,” tambah Sidarto.

Pimpinan lembaga negara juga mengharapkan agar pilpres dapat melahirkan pemimpin nasional yang dipilih secara demokratis dan konstitusional dan memiliki dukungan luas di mayoritas seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan representasi keberagaman berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.

Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu satu putaran, Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara menghargai keputusan MK tersebut. Hal ini untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.

Netralitas PNS, TNI dan Polri juga menjadi bahan pembicaraan rapat. Hal ini, tambah Sidarto, menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban agar seluruh tahapan pilpres berjalan dengan aman, damai dan lancar tanpa hambatan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden berharap, penyelenggaraan pilpres ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Ia menyatakan, seluruh pihak tentunya menginginkan ini

menjadi sejarah yang indah.

“Kalau dalam pilpres yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004 dan 2009, dapat berlangsung secara damai dan demokratis, aman, tertib dan lancar. Mari kita laksanakan kembali pilpres tahun ini juga berlangsung secara aman, tertib dan lancar. Rakyat Indonesia berharap agar pemilu pilpres juga berlangsung dengan baik,” jelas Presiden Yudhoyono.

SBY juga mengajak seluruh rakyat Indonesia, untuk menggunakan hak pilihnya, dan turut menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran pemungutan suara dan setelah hari pemungutan suara.

Presiden Yudhoyono juga meminta para kandidat pasangan capres dan cawapres untuk menghormati apapun hasil pilpres. Selain itu, SBY juga mengingatkan media massa agar menjadi bagian dari solusi untuk mendedahkan suasana politik.

“Saya tahu demokrasi itu memang memunculkan dinamika. Di saat tertentu, kompetisi semakin keras. Tetapi peran pers yang benar dan konstruktif justru bisa mendedahkan suasana, dan bukan sebaliknya,” himbau SBY. (sf/ foto:odjie/parle/iw.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pimpinan lembaga negara mengadakan rapat konsultasi menjelang Pilpres di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV MPR RI, Senin (7/7). Foto: Naefurodjie/Parle/iw



Tim Baleg DPR RI dipimpin Didi Irawadi Syamsudin menggelar pertemuan dengan Wagub Sulsel dan jajarannya serta Organisasi Penyandang Disabilitas dalam rangka Penyusunan RUU Penyandang Disabilitas, Jumat (4/7) Foto: Mastur Prantono/Parle/iw.



Tim Kunker Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin Romahurmuzyi meninjau dan melakukan penanaman pohon di Pulau Nipa, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (4/7). Foto: Iwan Armanias/Parle.

